

BAB V

KESIMPULAN

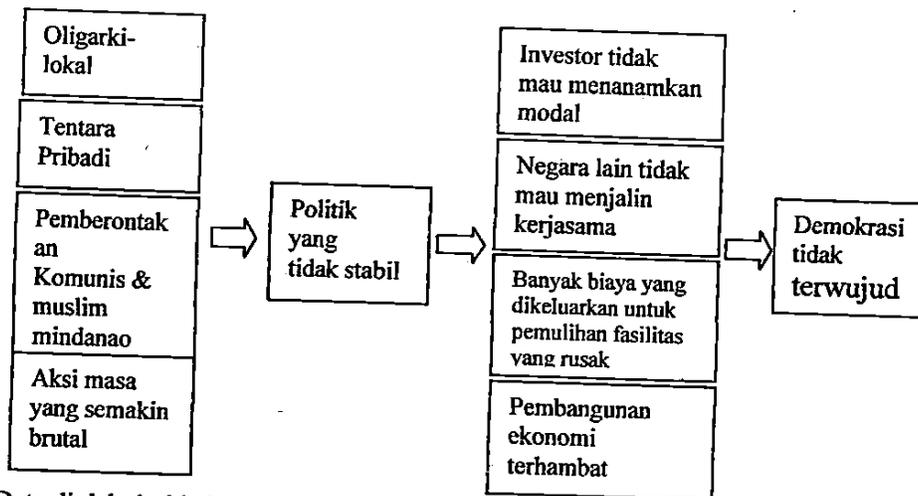
Filipina adalah Negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Mirip dengan Anglo-Amerika. Namun sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan negara berkembang lainnya. Hal ini sudah digeser oleh nilai-nilai oligarki lokal yang menciptakan perbedaan kelas yang sangat “mencolok” antara para *Patron* dan *Klien*. Perjalanan proses demokrasi yang panjang ternyata tidak mampu membuat demokrasi terjadi lebih matang dan maju di Filipina. Fakta pokok adalah bahwa di Filipina terdapat perbedaan kelas yang ekstrim di antara tuan-tuan tanah sebagai kaum borjuis dan buruh tani sebagai kaum proletar telah menciptakan suatu bentuk oligarki-lokal yang menjadi faktor utama terhambatnya suatu proses menuju demokrasi.

Demikian pula yang terjadi pada masa pemerintahan rezim Marcos (1965-1986), yang merupakan presiden terlama yang pernah memimpin Filipina. Demokrasi tidak terjadi ketika krisis politik semakin marak semenjak Marcos terpilih kembali menjadi Presiden pada tahun 1969. hal ini ditandai dengan meningkatnya demonstrasi massa, pemberontakan kaum muslim mindanao dan kaum komunis.

Marcos kemudian, dengan dalih untuk mewujudkan kestabilan politik guna mencapai suatu negara yang lebih demokrasti, telah memberlakukan Undang-undang Darurat Perang, lebih lanjut, Marcos mengutarakan alasan diberlakukannya *Martial Law* pada tahu.

1972 adalah karena ia menyimpulkan bahwa gagalnya demokrasi di Filipina selama ini lebih disebabkan oleh oligarki-lokal, yang berdasar pada sistem politik *Patron-Klien*. Para tuan-tuan tanah (*Land Lords*) didaerah pada umumnya memiliki tentara pribadi sehingga *warlord* sulit untuk dihindari. Hal ini telah menciptakan kondisi politik yang tidak stabil, dan semakin diperparah oleh aksi massa yang semakin brutal serta pemberontakan kaum komunis dan kaum muslim Mindanao.

Gambar 5.1
Faktor Penghambat Demokrasi Versi Marcos Sehingga Perlu Adanya
Pemberlakuan *Martial Law*



Data diolah dari beberapa sumber : 1. *Trend In the Philipines II*, 2. *The filipino Saga*, 3. Kehidupan politik di zaman marcos. Berdasarkan pada teori Roberd A Dahl.

Pemberlakuan *Martial Law*, sebagai tanda awal semakin lemahnya prospek demokrasi di Filipina. Hal ini dapat dilihat dari pers yang tidak bebas, pihak oposisi yang semakin lemah dikarenakan begitu besarnya kekuasaan rezim Marcos, kecurangan dalam pemilu, penangkapan tokoh-tokoh oposisi (yang puncaknya pembunuhan Benigno Aquino), penghapusan *Writ of Habeas Corpus*

dan lain-lain. Selain itu, Marcos memiliki campur tangan yang besar didalam lembaga legislatif dan yudikatif pasca *Martial Law*. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggota legislatif seberasal dari anggota KBL. Lembaga yudikatif tidak dapat berbuat banyak untuk membatasi kediktatoran Marcos.

Demokrasi yang kemudian terjadi adalah demokrasi semu. Hal ini dikarena budaya demokrasi di Filipina tidak dapat dipisahkan dari perbedaan kelas yang sangat ekstrim, sehingga sistem kelas patron-klien sudah terinternalisasi ke dalam masyarakat Filipina.

Setelah pemberlakuan *Martial Law*, hingga akhir masa pemerintahan Marcos dapat dibagi kedalam dua periode :

1. Masa Pemberlakuan *Martial Law* (1972-1981)

Pada masa ini demokrasi benar-benar mati di Filipina. Marcos membangun struktur kekuasaannya dengan membatasi ruang gerak oposisi, membatasi kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kongres dihapuskan, dan pemilu praktis ditiadakan selama enam tahun pertama pemberlakuan *Martial Law* (1972-1978). Dan karena tuntutan keadaan, peran militer dimaksimalkan guna membantu Marcos dalam menjalankan pemerintahan darurat perangnya.

Ketika pemilu di adakan kembali untuk pertama kalinya setelah diberlakukannya *Martial Law* ditahun 1978, bentuk pemerintahan otoriterisme konstitusional yang dibentuk atas kerja sama Marcos dan cronynya tidak berubah. KBL muncul sebagai partai yang mendominasi perolehan suara dalam pemilu. Hal ini merupakan usaha Marcos dalam melanggengkan kekeuasannya , dan terkesan

menegakkan kembali demokrasi yang telah mati. Namun oposisi tetap tidak dapat berbuat dalam menentang kekuasaan Marcos. Hal ini dikarenakan partai-partai oposisi belum bersatu dan masih terpecah, ditambah lagi kebijakan pemerintah selalu menguntungkan posisi KBL.

Marcos selalu berlindung dibawah pengaruh AS, hal ini dilakukannya dengan alasan ia butuh dukungan untuk meyingkirkan gerakan komunis (CPP dan NPA). Dukungan AS terhadap Marcos telah menjadikan KBL menjadi partai "tunggal" dalam periode *Martial Law*. Posisi Marcos menjadi sangat dominan didalam pemerintahan dan proses pemilihan. Dengan kondisi seperti ini pihak oposisi tidak dapat berbuat banyak dalam persaingan memenangkan suara dalam pemilu IBP (*Interim Batasang Pambansa*) 1978 dan pemilihan didaerah pada tahun 1981.

2. Setelah Pemberlakuan *Martial Law* (1981-1986)

Marcos mencabut pemberkakuan *Martial Law* pada 19 Januari 1981 melalui dekrit presiden No. 2045. Hal ini di ikuti dengan pemilihan anggota *Batasang Pambansa* reguler pada bulan Mei 1984 sejalan dengan amandemen konstitusi 1973.

Pasca pembunuhan Benigno Aquino, partai-partai oposisi mulai bersatu menyaingi KBL, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan Marcos yang semakin menyudutkan posisi mereka. Partisipasi mereka terlihat didalam pemilihan *Batasang Pambansa* pada mei 1984. pihak oposisi dipimpin oleh UNIDO (*United Nationalist Democratic Organization*) dan PDP-LABAN (*Partindo Demokratikong Pilipino-Lakas Ng Bayan*). Dalam pemilihan ini oposisi

mulai menunjukkan perolehan suara yang berarti. Namun inipun tak mampu menggeser poasisi Marcos, walaupun popularitas Marcos sudah menurun. Pada pemilihan Presiden 1986, KBL terus menjadi partai politik yang paling dominan. Memang kemenangan Marcos yang sangat kontroversial tersebut tidak masuk akal, ia dinyatakan memenamngkan pemilaihan oleh badan pemilihan bentukan pemerintah disaat dukungan dan simpati terhadapnya sudah sangat sedikit (bahkan AS, telah mengalihkan dukungannya kepada Cory Aquino sebagai tokoh oposisi). Kecurangan merupakan satu-satunya alasan yang dapat dimengerti, kenapa Marcos dinyatakan memenangkan pemilihan.